



MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI

Fadlika^{1(*)}, Siraj², Mukhlisuddin³

Universitas Almuslim, Aceh, Indonesia¹³

Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia²

fadlifadlika4@gmail.com¹, siraj@unimal.ac.id², mukhlisuddin.ilyas@gmail.com³

Abstract

Received: 30 April 2024

Revised: 30 April 2024

Accepted: 30 April 2024

This research aims to analyze the planning (budgeting), implementation (accounting) and monitoring (auditing) of BOS funds in improving the quality of education in Public Elementary Schools in Bintang District, Central Aceh Regency, to analyze the strategies and obstacles of school principals in managing BOS funds to improve the quality of education. This research method uses descriptive research with qualitative analysis. This research will be carried out at SD Negeri Bintang District, Central Aceh Regency. Data collection in this research used three techniques, namely interviews, observation and documentation. The research results show that 1) planning (budgeting) by making a School Activity and Budget Plan (RKAS) which is adjusted to the School Work Plan (RKS). The preparation of the plan begins with identifying needs and determining the priority scale or school needs. 2) In the implementation process (accounting), each use of BOS funds follows the technical guidelines that have been determined. One of them is that every transaction/expenditure is recorded or recorded in a special book by the treasurer as the manager of BOS funds, 3) The monitoring (auditing) process is carried out by the entire school community such as the principal, representatives, treasurer, committee and teachers. Apart from that, external audits are directly carried out by BOS management at the Education Office. 4) The principal's strategy in managing BOS funds to improve the quality of education at the Public Elementary School in Bintang District, Central Aceh Regency is carried out with planning that prioritizes school needs/priorities which emphasizes improving the quality of education. by providing learning facilities and media as well as developing teacher competency.

Keywords: Manajemen Kepala Sekolah; Pengelolaan Dana; BOS; Mutu Pendidikan

(*) Corresponding Author: Fadlika, fadlifadlika4@gmail.com

How to Cite: Fadlika, F., Siraj, S., & Mukhlisuddin, M. (2024). MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI. *Research and Development Journal of Education*, 10(1), 1443-1455

INTRODUCTION

Pendidikan adalah kunci peningkatan kualitas hidup manusia yang bertujuan memanusiaakan manusia. Sebagai sarana strategis, pendidikan berperan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia, baik untuk pembangunan bangsa maupun dalam tatanan global. Intinya, pendidikan merupakan proses pematangan kualitas hidup agar manusia memahami makna, tujuan, dan cara menjalani hidup dengan benar. Pendidikan mencerdaskan manusia, mengembangkan keterampilan, serta membentuk sikap hidup yang baik, sehingga mereka mampu berinteraksi di masyarakat dan

membantu diri sendiri, keluarga, serta lingkungan. Pendidikan juga merupakan investasi yang memberikan manfaat sosial dan pribadi, menjadikan bangsa bermartabat, serta individu yang berderajat (Engkoswara & Komariah, 2010). Dalam pelaksanaannya, pendidikan tidak terlepas dari aspek keuangan.

Dasar hukum terkait diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa dana pendidikan berasal dari anggaran pemerintah pusat, daerah, dan kontribusi masyarakat, termasuk iuran dari orang tua siswa, wali, serta sumbangan dari pihak lain, serta biaya pendidikan yang diberikan oleh organisasi masyarakat (Zulfa, 2016). Pasal 48 ayat 1 Bab XIII tentang Dana Pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 mengatur bahwa pengelolaan dana pendidikan harus mengikuti prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Ini berarti bahwa pengelolaan dana harus efisien agar semua aspek sekolah dapat merasakan manfaatnya, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat.

Keuangan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pendidikan dan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pendidikan. Sebagai salah satu faktor produksi, keuangan berperan mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran bersama dengan faktor-faktor lainnya (Mulyasa, 2011). Operasional pendidikan strategis tidak lepas dari dukungan dana yang cukup, karena setiap kegiatan pendidikan memerlukan biaya. Oleh karena itu, diperlukan manajemen keuangan yang baik untuk memanfaatkan dana secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari pendanaan pendidikan yang mengharuskan sekolah memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengelola, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan keuangan secara efektif dan transparan. Sebagai bagian dari manajemen pendidikan, manajemen keuangan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah (Mulyasa, 2011). Lembaga pendidikan juga perlu menerapkan tata kelola yang baik untuk memastikan transparansi dan mencegah tindakan yang dapat merugikan dunia pendidikan.

Keuangan menjadi isu utama dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketiadaan dana dapat menghambat proses pembelajaran, yang pada gilirannya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Namun, ini tidak berarti bahwa kelebihan dana akan membuat manajemen sekolah menjadi lebih baik. Dalam konteks perencanaan pendidikan, penting untuk memahami berbagai aspek yang terkait dengan keuangan dan pendanaan pendidikan. Dengan pemahaman ini, sistem pendanaan pendidikan yang lebih tepat dan adil dapat dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Supriadi, 2003). Secara umum, sebagian besar sekolah melakukan manajemen keuangan dengan cukup baik. Namun, tingkat penerapannya berbeda-beda antar sekolah, bergantung pada ukuran sekolah, lokasi, dan dukungan komunitas terhadap sekolah tersebut. Sekolah-sekolah biasa dengan dukungan komunitas yang rendah cenderung memiliki manajemen keuangan yang lebih sederhana. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang mendapat banyak dukungan komunitas biasanya memiliki manajemen keuangan yang lebih kompleks, karena harus memenuhi berbagai kegiatan yang semakin diharapkan oleh komunitas. Pengelolaan dana sekolah harus dilakukan dengan baik agar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Manajemen keuangan sekolah dimulai dengan perencanaan anggaran. Menurut Fattah (2004), perencanaan anggaran adalah kegiatan atau proses dalam mempersiapkan anggaran. Perencanaan anggaran memecah rencana ke dalam komponen dana untuk setiap kegiatan. Perencanaan anggaran memiliki dua komponen penting, yaitu estimasi pendapatan dan pengeluaran.

Setiap organisasi umumnya memiliki departemen keuangan yang berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan bagi manajemen puncak (Subana, 2014). Departemen ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan keuangan organisasi. Demikian pula,

setiap sekolah memiliki departemen atau individu yang mengelola sumber dan penggunaan dana. Untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana, diperlukan pelaporan atau akuntabilitas terkait penggunaan dana sekolah. Menurut penelitian Surya & Ihsan (2016), masalah utama dalam manajemen keuangan adalah perencanaan keuangan, pencatatan transaksi, dan laporan yang tidak profesional, yang mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap sekolah.

Pendanaan pendidikan adalah faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Zohriah (2015) menyatakan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dianggap berperan dalam meningkatkan kualitas sekolah. Peran ini meliputi pengembangan kemampuan lulusan, penetapan standar isi dan proses, pengembangan tenaga pengajar dan pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana, penetapan standar manajemen, pengembangan standar pendanaan, serta perencanaan dan pelaksanaan sistem evaluasi. Penelitian ini didukung oleh penelitian Maliki (2020), yang menunjukkan bahwa pengembangan delapan standar pendidikan dengan dukungan dana BOS dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal, sehingga meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Ini menunjukkan bahwa pendanaan sekolah memainkan peran penting dalam setiap program dan upaya peningkatan kualitas yang dilakukan di sekolah.

Implikasi pembiayaan pendidikan terhadap kualitas, seperti yang diungkapkan oleh Wibisono, et al. (2023) dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa ada dampak dari pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, yang terlihat dari prestasi yang telah dicapai. Selain itu, Komara, et al. (2023) dalam jurnal mereka menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS yang efektif dan efisien tidak dapat dipisahkan dari peran kepala sekolah dalam membuat kebijakan, merancang langkah strategis, dan melaksanakan berbagai inovasi dalam penggunaan dana BOS. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nugraha et al (2023) mengidentifikasi setidaknya tiga strategi utama bagi kepala sekolah dalam mengelola dana BOS, yaitu: (1) perencanaan disiapkan secara individu dan diproses bersama dalam rapat bersama tim BOS, (2) pelaksanaan program BOS dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, (3) proses penyusunan laporan dilakukan secara bertahap, yaitu pertama bendahara mengumpulkan semua bukti penerimaan untuk setiap bidang dan menyerahkannya kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah memeriksa langsung di lapangan dan pengawasan dilakukan secara langsung oleh unsur Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa studi di atas, para peneliti mengidentifikasi bahwa pembiayaan pendidikan, terutama dana BOS, memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah jika dikelola secara profesional, efektif, dan efisien. Namun, pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya dipahami oleh semua pemangku kepentingan sekolah dan masih banyak penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Priyono & Setyawati (2021) menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh sekolah adalah alokasi dana BOS yang tidak efektif, pencairan dana BOS yang sering terlambat, dan kurangnya kemampuan teknis dalam mengelola dana BOS. Kesenjangan ini berarti bahwa program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dapat terhambat akibat pengelolaan dana BOS yang tidak profesional.

Lembaga pendidikan tidak akan mampu mewujudkan visi dan misinya dengan baik jika tidak memperhatikan aspek manajemen kualitas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Corder yang menyatakan bahwa "kita akan merujuk kepada orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen sebagai pengendali. Sebenarnya, dalam banyak organisasi, gelar ini adalah kepala keuangan"

(Corder, 1988). Salah satu elemen penting dalam kualitas pendidikan adalah keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik adalah salah satu kunci keberhasilan lembaga pendidikan dalam memajukan atau meningkatkan kualitasnya.

Masalah-masalah di atas menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang profesional di sekolah sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan di sekolah juga memiliki peran penting dalam mengambil langkah strategis untuk memanfaatkan keuangan sekolah secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diketahui bahwa masalah dalam pengelolaan dana BOS di sekolah dasar di Kecamatan Bintang adalah kurangnya profesionalisme dalam mengelola dana BOS, baik dalam perencanaan (penganggaran), pelaksanaan, maupun pelaporan. Sering ditemukan bahwa pencairan dana BOS terlambat, serta penyerapan dana BOS yang kurang efektif dan optimal, yang pada akhirnya berdampak pada kegiatan untuk meningkatkan kualitas sekolah.

Berdasarkan informasi tambahan dari pengelola dana BOS, seperti kepala sekolah dan bendahara BOS, sering ditemui berbagai masalah di sekolah, antara lain: 1) Penundaan pencairan dana BOS yang sering terjadi, sementara kegiatan yang telah direncanakan dalam RKAS harus tetap berjalan, sehingga menyulitkan kepala sekolah dan bendahara BOS dalam mencari dana darurat; 2) Sekolah sering mengadakan kegiatan yang dananya tidak dianggarkan dalam RKAS, sementara kegiatan lain yang sudah direncanakan dan dianggarkan dalam RKAS tetap harus dilaksanakan, sehingga menyulitkan bendahara BOS dan kepala sekolah dalam mencari dana tak terduga; 3) Alokasi anggaran yang tidak ada dalam sistem aplikasi pelaporan penggunaan dana BOS, yang menyulitkan bendahara BOS dalam menyusun laporan penggunaan dana BOS; 4) Tidak tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai bendahara BOS, sehingga bendahara BOS harus terus meningkatkan kompetensinya karena tidak berasal dari bidang keuangan.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian diadakan di SD Negeri Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini akan dilakukan pada Tahun Ajaran 2023-2024 (November-April). Adapun yang menjadi subjek penelitian/partisipan dalam penelitian ini adalah Kepala SD Negeri Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, Bendaharawan Sekolah, dan Ketua Komite Sekolah. Teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi teknik analisis data; *data reduction, data display; dan conclusion drawing/ verification*.

RESULTS & DISCUSSION

Results

1. Perencanaan (Budgetting) Dana BOS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 dan 2 Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Upaya untuk mengetahui bagaimana perencanaan anggaran dibuat oleh pihak sekolah, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada 3 informan, yaitu kepala sekolah, Bendahara, dan komite. Masing-masing informan menjawab pertanyaan yang

diajukan peneliti untuk saling melengkapi dan menyempurnakan data dan temuan penelitian, penggalan informasi kepada ketiga informan untuk mendapat data mengenai manajemen keuangan sekolah khususnya BOS dalam hal perencanaan anggaran.

Kepala sekolah menyampaikan bahwa:

“Dalam perencanaan ini kami sebagai pengguna anggaran mengacu pada juknis dan peraturan-peraturan sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan yang sudah ada untuk pengelolaan BOS disamping kami memprioritaskan apa kebutuhan sekolah dengan bantuan dari bendahara, guru dan komite sekolah dalam rapat”.

Hasil wawancara dengan bendahara sekolah terkait perencanaan dan prosedur penyusunan RKAS, beliau menyampaikan bahwa:

“Tentu terlebih dahulu membuat perencanaan dan rancangan yang baik Manajemen keuangan sekolah ini terprogram dan terstruktur dengan baik mulai dari penyusunan skala prioritas penetapan anggaran sekolah dalam bentuk RKAS, kami selalu meidentifikasi dulu kebutuhan apa saja yang kami harus penuhi untuk tahun depan”.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari komite sekolah terkait perencanaan keuangan (*budgetting*) menyatakan bahwa:

“Kami telah menyusun pengeluaran-pengeluaran yang diidentifikasi oleh kepek dan bendahara, dan selanjutnya kami secara bersama-sama menyusun apa saja yang belum memenuhi syraat dan kebutuhan akan kami kaji ulang terlebih dahulu dan me-manage keuangan tersebut agar pengelolaan dan penggunaan ini sesuai dengan yang diharapkan karena salah satu pihak yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran adalah kami sebagai komitenya”.

Berdasarkan wawancara dengan ketiga informan di atas, peneliti menemukan beberapa poin penting yaitu (1) Bahwa perencanaan anggaran di SD Negeri 1 Bintang mengacu pada juknis dan RKAS, (2) perencanaan keuangan ini terlihat jelas bahwa alokasi anggaran yang berpihak pada upaya peningkatan pada aspek yang dianggap sangat prioritas dan penting oleh sekolah. (3) Dalam merencanakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, bendahara, guru dan komite selalu dilibatkan dalam merencanakan anggaran sekolah. Hal ini dilakukan agar terciptanya informasi yang transparan terkait dengan anggaran sekolah.

2. Pelaksanaan (*Accounting*) Dana BOS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 dan 2 Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan anggaran keuangan selaku SD Negeri 1 Bintang, berdasarkan interview di lapangan dengan kepala sekolah adalah mengacu pada Juknis BOS. Untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan anggaran, peneliti mengajukan pertanyaan kepada bendahara BOS di SD Negeri 1 Bintang. Dari beberapa pertanyaan tersebut peneliti mendapat informasi bahwa pengelola SD Negeri 1 Bintang dalam melaksanakan anggaran dan membelanjakan keuangan melakukan

pembukuan dengan mencatat berbagai sumber dana yang masuk dan keluar beserta jumlahnya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 1 Bintang mengatakan bahwa:
“pembukuan itu telah ditentukan dalam buku juknis BOS yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan”.

Informasi dari kepala sekolah juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan bendahara sekolah, ia mengatakan bahwa:

“setiap proses keuangan sekolah memang harus dilakukan karena itu merupakan juknis BOS”.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Komite Sekolah, ia mengatakan bahwa:
“dari sepengetahuan saya, iya memang selalu dilakukan pembukuan”.

Adapun teknis pencatatan penerimaan dana BOS yang dilakukan bendahara SD Negeri 1 Bintang adalah dengan cara dana BOS yang masuk ke rekening sekolah ditarik oleh bendahara dan kepala sekolah kemudian dicatat di dalam buku kas umum dan buku kas pembantu BOS. Kemudian baru sekolah dapat membelanjakannya untuk kepentingan kegiatan dan program sekolah sesuai RKAS. Segala pengeluaran keuangan dicatat oleh bendahara di dalam buku kas pembantu secara rinci. Selanjutnya penggunaan dana BOS dilaporkan oleh bendahara kepada kepala sekolah setiap akhir bulan.

3. Pengawasan (auditing) Dana BOS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 dan 2 Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Pengawasan (auditing) ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan perencanaan yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala dan kesulitan yang dihadapi agar dapat diatasi dan untuk mengukur ketepatan pelaksanaan program sesuai waktu yang ditentukan.

Proses auditing penggunaan dana BOS dilakukan secara internal maupun eksternal dan dilakukan oleh pengelola dana BOS SD Negeri 1 Bintang dalam hal ini oleh kepala sekolah di setiap akhir bulan sebelum Buku Kas Umum ditutup dan ditandatangani, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan kas, serta menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah secara tunai maupun yang masih ada di rekening bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam evaluasi/pengawasan ini pada dasarnya langsung ke manajemen bos ke Dinas pendidikan yang melakukan dan sudah ditentukan waktunya. Sedangkan kami juga melakukan pertanggungjawaban di tingkat sekolah dalam bentuk rapat internal”.

Teknis auditing di atas di perjelas lebih rinci oleh Bendahara sekolah, ia mengatakan bahwa:

“Adapun prosedur yang dilakukan kepala sekolah dalam mengevaluasi dan mengawasi penggunaan dana BOS adalah

dengan memperhatikan 3 hal, yaitu : apakah laporan disusun menurut ketentuan yang berlaku sesuai juknis, apakah laporan keuangan disusun secara konsisten dari waktu ke waktu dan apakah penjelasan dalam laporan keuangan diberikan secara memadai. Sehingga dapat diketahui apakah anggaran digunakan secara efektif dan efisien”.

Selanjutnya penggunaan dana BOS juga diawasi oleh komite sekolah yang selalu mengingatkan pengelola BOS sekolah agar menggunakan dana BOS sesuai aturan yang berlaku, hal ini tentunya bertujuan untuk mencegah dan menghindari penyalahgunaan dana BOS.

Selanjutnya evaluasi eksternal dilakukan oleh Tim manajemen BOS kabupaten, dalam hal ini dilakukan setiap akhir triwulan, dengan cara memeriksa berkas dokumen laporan BOS termasuk bukti-bukti pengeluaran keuangan dan bukti setor pajak. Evaluasi eksternal juga selalu dilakukan oleh inspektorat dengan cara langsung mendatangi sekolah untuk memeriksa secara detail penggunaan dana BOS di Lapangan. Evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan dana BOS bertujuan untuk memeriksa kesesuaian antara dokumen laporan BOS dengan bukti-bukti otentik di lapangan, pemeriksaan pun dilakukan secara menyeluruh baik kepada pengelola dana BOS juga kepada pihak-pihak sekolah yang berkaitan dengan dokumen laporan dan BOS tersebut, seperti guru, siswa, penanggung jawab program semuanya diperiksa.

4. Strategi dan Hambatan Kepala Sekolah dalam Mengelola Dana BOS untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 dan 2 Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.
 - a. Strategi

Peningkatan Mutu Pendidikan melalui pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 dan 2 Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan sekolah diawali dengan pembentukan tim BOS tingkat sekolah yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah dan Komite. Tim BOS tingkat sekolah tersebut kemudian menyusun RKAS dengan sebelumnya meminta masukan dari guru mengenai kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada satu tahun beserta dengan pembiayaannya. Penyusunan RKAS didasarkan kepada skala prioritas yang harus segera di adakan dan dilaksanakan.

Perencanaan menjadi konsepsi awal dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pengelolaan dana BOS. Hal tersebut tidak lepas dari proses penentuan skala prioritas sekolah, Hasil wawancara dengan bendahara SD Negeri 1 Bintang terkait dalam perencanaan dan prosedur penyusunan RKAS, beliau menyampaikan bahwa:

“Tentu terlebih dahulu membuat perencanaan dan rancangan yang baik Manajemen keuangan sekolah ini terprogram dan terstruktur dengan baik mulai dari penyusunan skala prioritas penetapan anggaran sekolah dalam bentuk RKAS, kami selalu meidentifikasi dulu kebutuhan apa saja yang kami harus penuhi untuk tahun depan”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bintang, beliau menyebutkan:

“Dalam pengelolaan keuangan sekolah prinsip utama yang kami pegang adalah transparansi, hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekolah. Kemudian untuk perencanaan sendiri kami memilah mana yang menjadi prioritas sekolah terlebih dahulu”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam perencanaan terlaksananya langkah-langkah strategis sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan. setiap kegiatan dan item yang ada dalam Standar Nasional Pendidikan harus menjadi patokan awal untuk pengalokasian dana BOS. Dalam hal ini bendahara SD Negeri 1 Bintang menyampaikan:

“Komponen pengeluaran sekolah mengacu pada 8 standar nasional pendidikan akan tetapi juga kami utamakan pada pengembangan guru seperti AKG dan kegiatan ekstrakurikuler”.

Penetapan Standar Nasional Pendidikan sebagai tolak ukur peningkatan mutu di sekolah sudah sangat tepat. Karena alokasi dana BOS selain untuk kegiatan operasional, pengelola harus mampu memaksimalkan anggaran untuk peningkatan kualitas.

Langkah konkrit yang dilakukan sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah meningkatkan kompetensi guru, sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SD Negeri 1 Bintang, yaitu:

“Langkah yang kami ambil adalah guru selalu mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar untuk mengasah kemampuan kami untuk lebih baik lagi untuk kesiapan memberikan pengetahuan bagi siswa”.

Kemudian beliau menambahkan:

“Disini ketika ada siswa yang menunjukkan bakat, misalnya anak ini punya bakat di olahraga maka guru olahraga akan membina dan mengarahkan supaya disiapkan fisik dan mentalnya. Kemudian di segi agama guru agama juga akan membimbing siswa yang punya potensi tahfiz misalnya”.

Selain pengembangan tenaga pendidik, sekolah juga fokus pada pengembangan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ini menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dan interpretasi data di atas peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS memiliki peran dalam peningkatan mutu pendidikan melalui alokasi dana khususnya alokasi dana yang menjadikan Standar Nasional Pendidikan sebagai prioritas utama.

b. Hambatan

Hambatan atau permasalahan dalam pengelolaan BOS di SD Negeri 1 dan 2 Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dirasa memiliki perbedaan. Permasalahan ini sedikit-banyak dapat menghambat dalam pembiayaan sekolah. Masalah-masalah ini akan juga menimbulkan masalah baru dalam sekolah apabila tidak segera di carikan solusinya.

Masalah yang dihadapi SD Negeri 1 Bintang terkait LPJ dana BOS yang harus disiapkan oleh sekolah guna pencairan dana BOS tahun berikutnya. Seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa:

“Pengalaman kami dalam penyusunan laporan mengalami beberapa kendala, karena kami tidak ada yang background administrasi ataupun keuangan dan ada ketentuan terkadang kami membutuhkan tenaga tambahan”.

Bendahara sekolah juga menyampaikan hal yang serupa:

“Selama ini kita selalu meminta tenaga khusus untuk membantu secara bersama-sama untuk menyusun laporan, karena kami semua kualifikasi pendidikannya guru/pendidik”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa hambatan yang dihadapi SD Negeri 1 Bintang adalah penyusunan laporan keuangan pengelolaan BOS.

Masalah kedua terjadi di SD Negeri 1 dan 2 Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah adalah kegiatan yang harus diikuti oleh sekolah yang mendadak dan tidak ada di dalam RKAS. Kegiatan lomba yang dibiayai oleh BOS haruslah masuk di dalam RKAS. Kegiatan lain yang tidak masuk di dalam RKAS tidak dapat dibiayai oleh BOS. Apabila ada kegiatan yang informasinya mendadak mengharuskan sekolah mencari solusi dalam pembiayaannya. Disisi lain SD Negeri dilarang untuk menarik iuran apapun ke orang tua siswa. Solusi dari masalah ini dengan mengalihkan pembiayaan lain yang dirasa tidak begitu mendesak pengadaannya.

Discussion

1. Perencanaan (budgetting) dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Dalam menetapkan biaya pendidikan segala keperluan harus disusun perencanaan dan analisis pembiayaan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan sebagai usaha dalam mencapai tujuan dan sasaran program lembaga pendidikan tersebut (Sherly, et al., 2020).

Perencanaan keuangan di SD Negeri Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Penyusunan anggaran dimulai dengan mengidentifikasi tujuan setelah mengkaji visi dan misi sekolah, lalu menetapkan skala prioritas atau kebutuhan sekolah.

Pemerintah sebagai penyedia dana pendidikan memiliki beberapa pertimbangan dalam penyediaan anggaran, yaitu prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Prinsip keadilan berarti pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Prinsip kecukupan memastikan bahwa pendanaan cukup untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sedangkan prinsip keberlanjutan mengacu pada penggunaan dana secara berkesinambungan untuk menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan SNP.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pembiayaan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bersama-sama mengerahkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan pembiayaan ini

harus berlandaskan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48. Selain itu, prinsip efektivitas juga diperlukan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan (Sherly, et al., 2020).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, perencanaan keuangan di SD Negeri Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah sudah memenuhi prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sekolah sangat transparan dalam pengelolaan keuangan, termasuk melibatkan guru dalam rapat perencanaan RKAS. Prinsip efisiensi diterapkan dengan menentukan skala prioritas anggaran agar dana digunakan secara tepat sasaran dan efisien. Selain itu, prinsip akuntabilitas tercermin dalam pelaporan keuangan sekolah, di mana laporan tersebut dijadikan tolak ukur efektivitas penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sekolah serta Dinas Pendidikan.

2. Pelaksanaan (actuating) dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara benar, efektif, dan efisien. Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus tertib, teratur, benar, cermat, dan transparan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada tahap pelaksanaan, terdapat tiga langkah utama: penyaluran dana, pencairan dana, dan penggunaan dana di lembaga pendidikan.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana BOS adalah pencatatan dan pendokumentasian setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan, yang disebut tertib administrasi. Tujuannya adalah untuk memastikan arus kas tercatat dengan baik, memudahkan proses monitoring dan evaluasi di masa depan. Selain itu, diperlukan penerapan panca tertib, yaitu: 1) Tertib program; 2) Tertib anggaran; 3) Tertib administrasi; 4) Tertib pelaksanaan; dan 5) Tertib pengendalian atau pengawasan (Sudrajat, 2019).

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa SD Negeri 1 dan 2 Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah sudah menerapkan tertib administrasi. Hal ini terlihat dari setiap penggunaan dana BOS yang mengikuti juknis yang telah ditetapkan, serta pencatatan setiap transaksi/pengeluaran yang dilakukan dalam buku khusus oleh bendahara sebagai pengelola dana BOS.

3. Pengawasan (auditing) dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Pengawasan adalah kegiatan untuk mengukur, membandingkan, dan menilai sejauh mana alokasi biaya dan penggunaannya. Manajemen pembiayaan mencakup: a) perencanaan keuangan (financial planning); b) pelaksanaan (implementation involves accounting), yaitu pelaksanaan kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat; dan c) evaluasi, yang merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tugas (Fattah, 2017).

Pengawasan merupakan bagian penting dari sistem manajemen pembiayaan, di mana pengawasan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber dana yang tersedia. Dengan adanya pengawasan, dapat diketahui seberapa besar kesesuaian antara biaya yang dialokasikan dalam RKAS dengan realisasi anggaran. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka diperlukan tindakan perbaikan, bahkan dapat diproses melalui jalur hukum jika diperlukan.

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan oleh seluruh masyarakat sekolah, termasuk kepala sekolah, wakil, bendahara, komite, dan guru. Prinsip transparansi berfungsi untuk memudahkan akses dalam pengawasan penggunaan anggaran dana BOS, sehingga dapat meminimalkan penyalahgunaan dana dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan dalam RKAS.

4. Strategi dan Hambatan Kepala Sekolah dalam Mengelola Dana BOS untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

a. Strategi

Peningkatan mutu pendidikan melalui pengelolaan dana BOS di SD Negeri Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan sekolah diawali dengan pembentukan tim BOS tingkat sekolah yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah dan Komite. Tim BOS tingkat sekolah tersebut kemudian menyusun RKAS dengan sebelumnya meminta masukan dari guru mengenai kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada satu tahun beserta dengan pembiayaannya.

Setiap kegiatan manajemen di sekolah pada dasarnya dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya pembelajaran. Selanjutnya dalam pengelolaan dana BOS SD Negeri 1 dan 2 Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah menekankan pada peningkatan mutu pendidikan. Hal ini terlihat dari skala prioritas yang ditentukan adalah pada item pemenuhan sarana dan media pembelajaran serta pengembangan kompetensi guru. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pendidikan pada umumnya.

b. Hambatan

Masalah yang dihadapi di SD Negeri 1 dan 2 Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah secara garis besar ada tiga, yaitu: belum adanya tenaga ahli dalam penyusunan laporan keuangan sekolah, penggunaan anggaran yang sifatnya insidental dan keterlambatan pencairan dana BOS

Permasalahan di atas jika tidak dicarikan solusi maka dikhawatirkan kedepan akan memunculkan masalah baru yang lebih kompleks. Dalam penyelesaian masalah ini sekolah menggunakan tenaga ahli tambahan untuk penyusunan laporan keuangan sekolah, kemudian jika ada keperluan penggunaan dana yang diluar rancangan RKAS maka sekolah bisa mengalihkan pembiayaan lain yang dirasa tidak begitu mendesak pengadaanya.

Selanjutnya untuk keterlambatan pencairan dana BOS menjadi masalah atau hambatan yang cukup berat hal ini dikarenakan sekolah harus membayar beberapa kebutuhan pokok sekolah atau biaya operasional rutin. Peneliti memberikan solusi dalam permasalahan ini adalah sekolah harus mampu menjalin kemitraan dengan koperasi setempat untuk membantu kebutuhan anggaran. Artinya sekolah bisa menjalin MoU dengan koperasi dengan beberapa kesepakatan yang tertulis. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi keterlambatan penyaluan dana BOS.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Proses penyusunan anggaran dimulai dengan identifikasi kebutuhan sekolah dan penetapan skala prioritas.
2. Pelaksanaan dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan. Setiap transaksi atau pengeluaran dana dicatat secara rinci dalam buku khusus oleh bendahara yang bertanggung jawab mengelola dana BOS.
3. Pengawasan dana BOS untuk peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dilakukan oleh seluruh elemen sekolah, termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan guru. Selain itu, audit eksternal dilakukan secara langsung oleh manajemen BOS di Dinas Pendidikan..
4. Strategi kepala sekolah dalam mengelola dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar Kabupaten Bintang, Aceh Tengah, melibatkan perencanaan yang mengutamakan kebutuhan sekolah dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dalam penetapan prioritas proyek, seperti peningkatan fasilitas dan media pembelajaran serta pengembangan kapasitas guru, untuk meningkatkan proses pembelajaran secara keseluruhan. Namun, terdapat tiga kendala dalam pengelolaan dana BOS, yaitu kekurangan tenaga ahli untuk menyusun laporan keuangan, penggunaan anggaran untuk kebutuhan insidental, dan keterlambatan dalam pencairan dana.

REFERENCES

- Corder, Anthony. (1988). *Teknik Manajemen Pemeliharaan*. Jakarta. Erlangga.
- Engkoswara, E. & Komariah, A. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, Nanang. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Komara, E., Mulyanto, A., Ichsanniaty, P. S., Purnama, W., & Sanny, M. (2023). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Tata Kelola BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(5)*, 3351-3357.
- Maliki, B. I. (2020). Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *TARBAWI, 8(2)*, 163-176.
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Priyono, S., & Setyawati, R. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Negeri 1 Kebumen Tahun 2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 1(1)*, 248-263.
- Sherly et al. (2020). *Manajemen Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

- Sudrajat, A. R. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap. *Manazhim*, 1(2), 166-182.
- Surya, F., & Ihsan, H. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Sekolah Berbasis Database pada Sekolah Dhuafa. *Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 18-24.
- Wibisono, Y., Martono, S., Arief, S., & Irwan, I. (2023, June). Manajemen Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* (Vol. 6, No. 1, pp. 1214-1221).
- Zohriah, A. (2015). Analisis standar sarana dan prasarana. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 1(02), 53-62.
- Zulfa, U. (2016). Strategi pengembangan madrasah efektif melalui pengembangan model manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis ziswa-school levy. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(1), 129-140.